

ABSTRAK

SULTAN ALAUDDIN. *Hubngatt Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penetapan Peraturan Desa (PERDES) Di Desa patani Kecamatan Mappakasungguh Kabupaten Takalar*
(dibimbing oleh: H. Ansyari Mone dan Andi.Luhur Prianto)

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Hubungan Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawarata Desa (BPD) Dalam Penetapan Peraturan Desa (PERDES) Di Patani Kecamatan Mappakasungguh Kabupaten Takalar Terkait dengan Hubungan Antara Kepala Desa Dan Badan Pennusyawarata Desa (BPD) Dalam Penetapan Peraturan Desa (PERDES) agar mencapai hasil yang maksimal, maka terdapat faktor- faktor yang mempengaruhi, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat di dalam pelaksanaannya.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif (menggambarkan situasi/kejadian) dengan sampel yakni Kepala Desa Patani, ketua BPD desa patani beserta jajarannya dan beberapa tokoh masyarakat Desa Patani Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* (sampel secara sengaja). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Data di analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hubungan Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawarata Desa (BPD) Dalam Penetapan Peraturan Desa (PERDES) Di Desa Patani Kecamatan Mappakasungguh Kabupaten Takalar sudah bejalan dengan saling mengisi sebagai mitra dalam menjalankan proses pemerintahan, walaupun belum terlalu efektif hal ini terlihat dalam hal penetapan peraturan desa, BPD sampai sejauh ini hanya mampu melaksanakan satu kali musyawarah sehingga peraturan desa yang ditetapkan ole kepala desa hanya satu yakni tentang APBDes. Dan hal ini tejadi karena lemahnya sumber daya manusi (SDM), Adanya kekosongan jabatan dalam pengurus BPD dan tidak adanya pelatihan- pelatihan yang diberikan kepada BPD tentang pelaksanaan peran dan fungsinya dalam pemerintahan desa untuk itu dibutuhkan peningkatan sumber daya manusia dengan pemilihan orang yang tepat untuk duduk dalam pengurus BPD dan dibutuhkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan para anggota BPD sehingga tidak adaiaqi kekosongan jabatan dalam BPD yang dapat menghambat jalannya proses pemerintahan.